

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perubahan iklim merupakan berubahnya kondisi fisik atmosfer bumi antara lain suhu dan distribusi curah hujan yang membawa dampak luas terhadap berbagai sektor kehidupan manusia. Perubahan iklim dan risiko lingkungan yang disebabkan memiliki dampak yang lebih besar pada daerah pesisir. Sebagai area dimana mayoritas masyarakat bumi bermukim, area pesisir semakin beresiko untuk terkena dampak kenaikan permukaan laut serta frekuensi gelombang badai yang meningkat (Neumann, 2015). Pada dasarnya, kenaikan permukaan laut merupakan salah satu efek perubahan iklim yang paling nyata. Kenaikan permukaan air rata-rata global meningkat dengan cepat kenaikan mencapai 3,7 mm/tahun selama periode 2006-2018, lebih dari dua kali lipat dibandingkan dengan abad ke-20. Menurut badan Administrasi Kelautan dan Atmosfer Nasional, pada tahun 2021, permukaan laut rata-rata global adalah 97 milimeter (3,8 inci) di atas permukaan tahun 1993. Selain itu, laporan Badan Penerbangan dan Antariksa Nasional Amerika Serikat atau NASA juga menunjukkan bahwa per Februari 2023, permukaan laut rata-rata global telah mencapai 98,5 milimeter, menjadikannya rata-rata tahunan tertinggi dalam catatan satelit (NASA, 2023).

Hal ini menunjukkan bagaimana permukaan laut rata-rata global terus meningkat selama beberapa dekade terakhir dan laju kenaikannya semakin cepat. Permukaan laut terus meningkat dengan kecepatan sekitar seperdelapan inci (3,2 mm) per tahun. Menurut sebuah laporan tentang perubahan iklim yang diterbitkan oleh Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa, kenaikan permukaan laut rata-rata 4,62 mm per tahun antara tahun 2013-2022 disebabkan oleh pencairan gletser yang ekstrim (Farge, 2023).

Kenaikan permukaan air laut yang lebih tinggi memungkinkan gelombang badai yang mematikan untuk bergerak lebih jauh ke daratan daripada sebelumnya,

yang juga berarti banjir dapat terjadi dengan lebih sering. Karena resiko tersebut, kenaikan permukaan air laut berbahaya terutama bagi masyarakat dan ekosistem pesisir (Nicholls, 2007).

Kenaikan permukaan air laut tidak terjadi dalam pola spasial yang seragam, melainkan menunjukkan pola yang kompleks, sebagaimana ditunjukkan oleh pengamatan yang telah dilakukan oleh peneliti terdahulu (Douglas 2001 ; IPCC 2007). Perubahan pada permukaan air laut menunjukkan pola regional yang kuat (dalam ruang dan waktu), dan mungkin berbeda secara signifikan dari rata-rata global. Dalam beberapa wilayah kenaikan permukaan air laut lokal lebih cepat dan lebih tinggi dari rata-rata global. Di sisi lain, di wilayah lain, kenaikan permukaan air laut lokal jauh di bawah atau bahkan negatif dari rata-rata global. Dari pernyataan tersebut, diketahui bahwa tingkat kerentanan di setiap wilayah pesisir berbeda-beda dan bergantung pada aktivitas dan gangguan yang dialami, antara lain faktor antropogenik (akibat aktivitas manusia) dan faktor alam (Stammer, 2013).

Karena perubahan iklim, permukaan laut dapat naik melalui dua mekanisme berbeda. Pertama, saat suhu laut naik akibat kenaikan suhu global, lebih banyak air laut diproduksi, mengisi cekungan samudra dan menaikkan permukaan air. Mekanisme kedua melibatkan pencairan es, yang menyebabkan laut mendapatkan lebih banyak air. Aktivitas antropogenik secara tidak langsung nyatanya juga diklaim mempercepat perubahan faktor-faktor tersebut. Lautan menyerap lebih dari 90 persen peningkatan panas atmosfer yang terkait dengan emisi dari aktivitas manusia. Karena fakta yang memprihatinkan ini, para peneliti mengklaim bahwa SLR mengancam jutaan orang, SLR akan berdampak pada kota-kota pesisir (Kulp & Strauss, 2019; Mengel, 2018).

Permukaan air laut Indonesia juga diketahui cenderung mengalami peningkatan setiap tahunnya. Permukaan air laut Indonesia meningkat 62,3 milimeter pada 11 Mei 2022, menurut data yang dikumpulkan oleh Dana Moneter Internasional (IMF) melalui amatan satelit Jason3. Dibandingkan dengan hampir tiga puluh tahun sebelumnya, peningkatan ini cukup signifikan. Permukaan air laut Indonesia meningkat rata-rata 4 mm per tahun, jauh lebih tinggi dari rata-rata global yang hanya meningkat 3 mm per tahun. Selain itu, tren kenaikan permukaan air laut Indonesia adalah yang keempat tertinggi di dunia (Sadya, 2022).

Selain itu, laporan pada tahun 2019 oleh Newswire menunjukkan bahwa permukaan air laut di wilayah Jakarta Bagian Utara sudah mencapai 1,5 meter di atas permukaan tanah. Di sisi lain, penelitian dari Universitas IPB di Jawa Barat, Indonesia, menunjukkan bahwa beberapa wilayah di Jakarta berisiko tenggelam antara 1,8 cm dan 10,7 cm per tahun selama 2019 dan 2020, dengan penurunan tanah terbesar di Jakarta Utara diperkirakan sekitar 4,9 cm per tahun. Hal ini menunjukkan bahwa naiknya permukaan laut dan penurunan tanah membuat bagian utara Jakarta, Indonesia, menghadapi masalah besar. Akibat kenaikan permukaan air laut sebesar 10 sentimeter per tahun, DKI Jakarta dianggap sebagai wilayah paling terancam di Asia menurut Robert Nicholls, direktur Pusat Penelitian Perubahan Iklim Tyndall di Inggris (Setyowibowo, Aldrian, 2021).

Hal ini diperkuat dengan analisis data yang dilakukan oleh Rais pada tahun 2022, yang menunjukkan bahwa kenaikan muka air laut di kawasan Teluk Jakarta antara tahun 1992 sampai dengan tahun 2021 relatif berfluktuasi dengan kecenderungan naik setiap lima tahun. Karena dinamika air laut cenderung pasang dan siklus perubahan kenaikan permukaan air laut terjadi setiap tiga sampai lima tahun sekali. Telah terjadi kenaikan yang konsisten sebesar 200 sentimeter, selama 30 tahun terakhir (Rais, 2022).

Banjir pesisir menambah risiko tambahan yang signifikan dalam beberapa dekade mendatang. Jakarta Utara hampir tenggelam total pada tahun 2050, karena kenaikan permukaan laut digabungkan dengan penurunan tanah yang cepat. Proyeksi penurunan muka tanah di beberapa lingkungan pesisir melebihi 5m pada tahun 2050, dibandingkan dengan proyeksi kenaikan permukaan laut sebesar 25cm (Andreas, 2018, Kulp dan Strauss 2019).

Eksplorasi air tanah menyebabkan penurunan permukaan tanah. Air permukaan yang disalurkan melalui pipa hanya menyumbang setengah dari total konsumsi air, dan kekurangan tersebut disebabkan oleh pengambilan air tanah yang tidak tercatat dan tidak diatur. Permintaan air terus meningkat seiring dengan pertumbuhan penduduk, namun pasokan air permukaan menjadi stagnan dan terkikis karena polusi, pengolahan yang buruk, dan terbatasnya infrastruktur pipa.

Oleh karena itu, upaya untuk mengurangi penurunan permukaan tanah menghadapi kesulitan mendasar (Luo, 2019).

Naiknya permukaan air laut mempunyai dampak negatif yang signifikan terhadap perairan pesisir, seperti erosi pantai dan dapat menyebabkan tenggelamnya pulau-pulau kecil dan wilayah pesisir. Di sisi lain, kenaikan permukaan air laut dalam jangka waktu yang lama akan meningkatkan jumlah air laut sehingga meningkatkan intensitas dan frekuensi banjir dan genangan di suatu wilayah daratan. Kenaikan permukaan air laut juga mengancam mata pencaharian pesisir seperti pariwisata, perikanan dan silvikultur, secara tidak langsung menekan migrasi melalui dampak buruk pada keberlangsungan hidup manusia (Hauer, 2020).

Karena masalah yang sedang berlangsung ini, warga Jakarta diketahui telah mulai menaikkan lantai mereka, menambah tingkat pada bangunan, dan membangun penghalang menggunakan batu bata atau kayu untuk mencegah air banjir masuk ke rumah mereka. Sebuah tanggul beton kecil juga dibangun di daerah Pluit pada awal tahun 2000 dan ditinggikan secara berkala (dengan sebagian besar wilayah sekarang berada beberapa meter di bawah permukaan laut), dengan tanggul baru yang lebih modern dibangun menjelang akhir tahun 2010-an. Dengan keadaan seperti ini, berpotensi menyebabkan efek domino terjadinya peningkatan migrasi ke tujuan yang lebih jauh dan secara signifikan mengubah distribusi populasi (Hauer & Esteban, 2020).

Sejatinya telah banyak upaya yang dilakukan untuk mengendalikan kenaikan permukaan air laut di kawasan Jakarta. Oleh karena itu, pemerintah dan otoritas publik lokal dihadapkan pada tantangan untuk mengembangkan strategi adaptasi yang menggabungkan antisipasi morfodinamik garis pantai, mempertahankan populasi dan aktivitas, menghindari kerusakan properti dan manusia jika terjadi bencana, dan akhirnya, secara bertahap mengatur ulang pemukiman pesisir. Adapun ide yang dimaksud antara lain, pembangunan tanggul Jakarta, akomodasi terapung, dan juga sistem polder yang menggabungkan tanggul, danau, dan juga pompa (Fauzan, 2021).

Sejalan dengan itu, Pemprov telah menyatakan minatnya terhadap konsep National Capital Integrated Coastal Development (NCICD) yang bertujuan untuk mengimplementasikan tanggul pantai atau tanggul rob di wilayah pesisir Jakarta

Utara, melalui Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI Jakarta. Gubernur DKI Jakarta pun menyambut positif proyek ini, terbukti dengan prioritasnya tanggul sepanjang 46 kilometer di kawasan pesisir Jakarta Utara (Faisal & Nababan, 2021).

Proyek tanggul NCICD sendiri dimaksudkan untuk mengurangi banjir rob yang sering terjadi di wilayah pesisir dan kenaikan permukaan air laut akibat perubahan iklim. Tanggul lepas pantai akan dibangun menyerupai bentuk Garuda dengan kepala menghadap ke utara, sesuai masterplan yang dimiliki NCICD. Oleh karena itu, tanggul diperkirakan mampu menahan kenaikan muka air laut selama 100 tahun ke depan, atau lebih khusus lagi ketika muka air laut naik 1 meter (Bachtiar, 2017).

Proyek tanggul Jakarta akhirnya mengalami keterlambatan yang disebabkan oleh berbagai hal, seperti halnya proyek konstruksi lainnya yang sering mengalami hambatan dan kendala, seperti koordinasi dan komunikasi yang buruk antar departemen dalam organisasi kerja, keterlambatan dalam proses pengadaan material, dan perencanaan kerja yang terstruktur dengan eksekusi yang buruk, dan lain sebagainya. (Schulz & Putra, 2021).

Hal ini mendorong kehadiran Greenpeace untuk turut terlibat dalam menangani kenaikan permukaan air laut di Jakarta. Greenpeace adalah lembaga swadaya masyarakat (LSM) lingkungan internasional yang bergerak di bidang lingkungan. Greenpeace adalah organisasi lingkungan hidup global yang didirikan di Vancouver, British Columbia, Kanada, pada tahun 1971. Kehadiran LSM di tengah masyarakat merupakan hal yang tidak dapat dipungkiri. Hal ini disebabkan keterbatasan Negara yang tidak dapat memenuhi kebutuhan rakyatnya secara keseluruhan dan atau keterbatasan masyarakat dalam memenuhi tuntutan mereka kepada Negara. Sehingga pada akhirnya aktor LSM mengambil alih peran dalam menjembatani antara masyarakat dengan Negara. Di Indonesia, Greenpeace telah menjadi salah satu aktor yang peduli terhadap lingkungan dan banyak melakukan aksi damai tentang kerusakan lingkungan. Berdasarkan laporan-laporan Greenpeace terdahulu, organisasi tersebut berfokus pada beberapa isu, yaitu isu kehutanan, energi, air, dan kelautan (Ramadhona, 2021).

Greenpeace telah mencoba meningkatkan kesadaran tentang isu kenaikan permukaan laut melalui kampanye dan materi pendidikannya. Mereka bekerja untuk menginformasikan kepada masyarakat tentang penyebab kenaikan permukaan laut, dampak yang ditimbulkannya, dan apa yang dapat dilakukan untuk mencegahnya. Upaya Greenpeace untuk meningkatkan kesadaran tentang kenaikan permukaan laut telah dilakukan dalam berbagai bentuk, termasuk protes, materi pendidikan, dan laporan penelitian. Organisasi ini juga bekerja untuk membangun kemitraan dengan pemerintah dan organisasi lain untuk membantu mengatasi masalah ini. Pekerjaan Greenpeace sangat penting untuk meningkatkan kesadaran tentang kenaikan permukaan laut dan membangun momentum yang diperlukan untuk mengambil tindakan untuk mengatasi masalah kritis ini (Greenpeace Indonesia, 2021a).

Secara global, ada beberapa program yang telah dilakukan sebagai upaya Greenpeace untuk meningkatkan kesadaran tentang isu kenaikan permukaan laut. Pada tahun 2019, Greenpeace meluncurkan kampanye yang disebut "Protect The Ocean". Kampanye tersebut menyuarakan kepada pemerintah untuk menciptakan suaka laut yang dilindungi dari penangkapan ikan dan bentuk eksploitasi lainnya (Greenpeace International, 2019). Suaka laut dapat membantu melindungi kehidupan dan ekosistem laut, yang pada gilirannya dapat membantu mengurangi dampak kenaikan permukaan laut. Pada awal tahun 2023, aktivis Greenpeace memblokir rig minyak Shell di Samudra Arktik untuk memprotes pengeboran minyak di Arktik, yang menurut mereka akan berkontribusi pada perubahan iklim dan kenaikan permukaan laut. Bersama-sama mereka menempati peralatan sepanjang perjalanan hampir 4.000 km, menyoroti rencana ceroboh Shell untuk terus melakukan pengeboran untuk mendapatkan lebih banyak bahan bakar fosil (Greenpeace International, 2023).

Tidak hanya dalam skala global yang luas, Greenpeace juga mengadvokasi isu kenaikan permukaan air laut di Jakarta. Pada tahun 2021, Greenpeace Asia Timur merilis laporan berjudul "Proyeksi Dampak Ekonomi Kenaikan Permukaan Laut Ekstrem di Tujuh Kota Asia pada Tahun 2030." Laporan tersebut menemukan bahwa Jakarta adalah salah satu kota yang paling rentan di Asia terhadap kenaikan permukaan air laut, dengan hampir 17% luas daratannya berada di bawah

permukaan air laut yang dapat meningkat jika terjadi banjir selama 10 tahun pada tahun 2030. Laporan tersebut juga menemukan bahwa kenaikan permukaan laut dapat membahayakan PDB sebesar US\$68 miliar dan 1,8 juta orang di Jakarta (Greenpeace Indonesia, 2021b).

Greenpeace juga mengorganisir protes dan demonstrasi di Jakarta untuk meningkatkan kesadaran tentang isu kenaikan permukaan laut. Pada tahun 2022, aktivis Greenpeace melakukan protes di depan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Indonesia untuk menuntut pemerintah mengambil tindakan untuk mengatasi kenaikan permukaan laut. Para aktivis juga merilis video berjudul "Jakarta Tenggelam" yang menunjukkan dampak kenaikan permukaan air laut di kota tersebut (Greenpeace Indonesia, 2022.).

Greenpeace juga telah bekerja sama dengan masyarakat lokal di Jakarta untuk membantu mereka mempersiapkan diri menghadapi dampak kenaikan permukaan air laut. Pada tahun 2021, Greenpeace membantu membangun tanggul laut di lingkungan Muara Baru Jakarta, yang merupakan salah satu daerah yang paling rawan banjir. Greenpeace juga membantu melatih penduduk setempat dalam pengurangan risiko bencana dan adaptasi iklim (Greenpeace Indonesia, 2022).

Dalam menjalankan programnya, Greenpeace sering menggunakan strategi TAN. TAN adalah singkatan dari *transnational advocacy network* atau jaringan advokasi transnasional, yang merupakan jaringan organisasi dan individu yang bekerja sama untuk mengadvokasi tujuan bersama. TAN sering digunakan untuk mengatasi masalah kompleks dan lintas batas, seperti kenaikan permukaan laut. Dengan bekerja sama dengan kelompok dan organisasi lain, Greenpeace dapat meningkatkan kesadaran akan masalah ini, menekan pemerintah untuk mengambil tindakan, dan membangun dukungan untuk solusi (Keck & Sikkink, 2014).

Oleh karena itu, bagaimana advokasi Greenpeace dalam menangani kenaikan permukaan air laut di Jakarta menjadi hal yang perlu diteliti karena masalah ini memiliki konsekuensi yang serius dan kompleks. Greenpeace sebagai lembaga swadaya masyarakat lingkungan internasional telah lama terlibat dalam isu-isu lingkungan global, termasuk perubahan iklim dan dampaknya, seperti kenaikan permukaan air laut. Sementara itu, pemerintah Indonesia mengemban tanggungjawab dan kewajibannya untuk menjamin kehidupan yang sehat dan

sejahtera bagi masyarakat Indonesia, dengan meminimalisir resiko bencana seperti kenaikan air laut. Sehingga, diperlukan kerjasama yang baik antara pemerintah dengan pihak-pihak lain untuk membantu mewujudkan hal tersebut.

Dengan mempertimbangkan pemasalahan yang telah dijabarkan sebelumnya, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang dampak yang mungkin terjadi dan solusi yang efektif dalam menghadapi tantangan ini. Penelitian juga dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang interaksi antara berbagai faktor, seperti peningkatan permukaan air laut, erosi pantai, perubahan iklim, dan kerentanan masyarakat lokal. Penelitian tentang upaya Greenpeace dalam mengadvokasi isu kenaikan air laut akan memberikan pemahaman yang lebih baik tentang peran dan dampak LSM lingkungan dalam menangani isu-isu lingkungan di Jakarta serta bagaimana kerjasama antara Greenpeace sebagai organisasi non-pemerintah dapat berhubungan dengan pemerintah dalam mengatasi permasalahan tersebut. Hal ini akan memberikan wawasan tentang keberhasilan, tantangan, dan pelajaran yang dapat diambil untuk menginformasikan upaya advokasi di masa depan. Penelitian ini juga dapat menjadi sumber informasi yang berharga bagi pemangku kepentingan lainnya, seperti pemerintah, organisasi non-pemerintah lainnya, dan masyarakat umum berkaitan dengan kebijakan dan tindakan yang lebih efektif dalam menangani kenaikan permukaan air laut di Jakarta.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah dijabarkan, maka dapat dirumuskan permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini. Adapun rumusan permasalahan yang di kembangkan yaitu: “Bagaimana strategi advokasi Greenpeace dalam menangani kenaikan permukaan air laut di Jakarta?”.

1.3 Pembatasan Masalah

Pembatasan masalah dalam penelitian dilakukan agar tidak terjadi penyimpangan maupun pelebaran focus penelitian sehingga arah dari penelitian dapat di tentukan sesuai dengan inti masalah dan tujuannya. Adapun Batasan masalah dalam penelitian ini meliputi tentang: Lingkup masalah berfokus pada isu kenaikan permukaan air laut di Jakarta, serta lingkup waktu strategi yang diteliti yaitu selama periode 2019-2022. Dan juga, objek yang dikaji yaitu Greenpeace Indonesia; dengan informasi yang digali yaitu strategi advokasi yang dilakukan oleh Greenpeace Indonesia dan instansi yang mungkin terlibat dalam strategi tersebut.

1.4 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.4.1 Tujuan Penelitian

Dengan mempertimbangkan rumusan permasalahan dan Batasan yang telah ditentukan sebelumnya, maka dapat diketahui tujuan dari penelitian ini yaitu untuk:

1. Mengetahui persoalan kenaikan air laut di Jakarta
2. Mengetahui strategi Transnational advokasi network Greenpeace

dalam menangani kenaikan air laut di Jakarta

3. Mengidentifikasi kendala dalam upaya advokasi transnational dari

Greenpeace dalam menangani kenaikan air laut di Jakarta.

1.4.2 Kegunaan Penelitian

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran terutama berkaitan dengan keterlibatan dan Upaya advokasi NGO dalam isu lingkungan di Indonesia bagi para sivitas akademika di bidang Hubungan Internasional

2. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi sebagai referensi atau sumber dan bahan kajian tambahan bagi pihak lain yang ingin memperluas kajian ilmu Hubungan Internasional khususnya dalam konteks transnational advocacy network.